

TANTANGAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN IKN (IBU KOTA NEGARA) BARU DALAM PERSPEKTIF GENDER

Suharnanik¹, Yelly Elanda², Azizah Alie³

¹Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, nanik_fisip@uwks.ac.id

²Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yelly.elanda@uwks.ac.id

³Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, irwanto.azizah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan nasional menjadi isu yang penting. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan representasi partisipasi perempuan dalam pembangunan. IPG dan IDG di Kalimantan Timur masih berada di bawah capaian nasional atau tergolong rendah. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru seharusnya menjadi momen untuk meningkatkan IPG dan IDG di Kalimantan Timur agar perempuan tidak semakin teralienasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan pembangunan dan pemberdayaan gender serta strategi yang dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan gender di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN baru. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai literatur/referensi yang berkenaan dengan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender khususnya di Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum trend IPG dan IDG di Kalimantan Timur mengalami peningkatan. Namun terdapat kesenjangan yang cukup tajam pada kemudahan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada pembangunan. Diperlukan komitmen dan upaya yang cukup keras bagi semua pihak agar dapat meminimalisir kesenjangan gender dalam pembangunan. Program pengarusutamaan gender yang bersifat multi program dan lintas sektor diharapkan mampu untuk meningkatkan partisipasi, manfaat, akses dan kontrol perempuan dalam pembangunan.

Kata kunci: *Pembangunan Gender; IKN; Kalimantan Timur; Indeks Pembangunan Gender; Indeks Pemberdayaan Gender.*

1. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara Baru merupakan bagian dari upaya pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Indonesia memiliki masalah pembangunan yang hanya terkonsentrasi pada beberapa wilayah, terutama wilayah bagian barat. Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa Pulau Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara Baru bagi Indonesia. Beberapa riset menyebutkan bahwa pemilihan Kalimantan Timur berdasarkan asas pemerataan ekonomi (Silalahi, 2019), memiliki sumber cadangan energi yang besar (Nugroho, 2020), lebih tahan terhadap bencana alam (Kurniadi, 2019). Tentunya pertimbangan ini belum cukup dalam mempertimbangkan keputusan apakah pembangunan IKN baru menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Keputusan pemindahan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang lebih komprehensif meliputi kajian sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan negara. Publik juga mestinya dilibatkan dalam mendorong pemindahan ibu kota negara ini, sebab dalam riset Jemparu, menyatakan sentiment netral, meskipun publik tidak memberikan sikap setuju atau tidak setuju terhadap pemindahan ibu kota negara (Jemparu 2020).

Kebijakan yang mengatur ditetapkan dalam UU IKN nomor 3 tahun 2022 telah resmi diundangkan pada 15 februari 2022. Kebijakan tersebut memberikan jalan lebar bagi terlaksananya pembangunan IKN dan pemerataan pembangunan terutama pembangunan yang berperspektif gender. Pembangunan IKN seharusnya dapat menurunkan tingkat kesenjangan gender dalam pembangunan. Perempuan harus berkontribusi dalam pembangunan IKN baru. Data menunjukkan bahwa tingkat IPG di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara mengalami peningkatan meskipun masih berada di bawah rata-rata capaian IPG provinsi Kalimantan Timur (Badan Pusat Statistik 2022). Untuk itu diperlukan analisis komprehensif terhadap IPG dan IDG yang ada di Kalimantan timur khususnya kabupaten Penajam paser dan Kutai Kartanegara. Hal ini dilakukan untuk memetakan tantangan pembangunan dan pemberdayaan gender sehingga dapat merumuskan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan gender di Kalimantan Timur khususnya di wilayah IKN baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ketertinggalan perempuan dalam pembangunan IKN baru.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian studi kualitatif, analisa data diambil dengan melalui kajian studi, literature review yang berupa artikel jurnal nasional maupun dan internasional bereputasi. Selain itu peneliti juga menggunakan data sekunder yang terkait dengan indeks pembangunan gender, data pendapatan perempuan dibandingkan laki-laki serta data sekunder lainnya. Selain itu digunakan juga dokumen kebijakan terkait perencanaan, petunjuk teknis/pedoman teknis, laporan- laporan, dan dokumen lain yang terkait pemindahan Ibukota baru ke Kalimantan Timur.

3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

3.1. Tantangan Peningkatan Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di IKN Baru

Indeks pembangunan gender atau IPG merepresentasikan perbandingan atau rasio indeks pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak indeks pembangunan manusia laki-laki dan perempuan maka semakin kecil kesenjangan gender yang terjadi dalam pembangunan (Badan Pusat Statistik, 2022). Untuk mengetahui IPG maka indeks pembangunan manusia (IPM) laki-laki dan perempuan harus diketahui terlebih dahulu sehingga dapat memperbandingkan tingkat IPM laki-laki dan perempuan. IPG ini digunakan untuk mengungkap tingkat kesenjangan atau ketidakadilan gender dalam pembangunan. Indikator untuk mengukur indeks pembangunan gender diantaranya adalah angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, rata-rata harapan lama sekolah dan pengeluaran rata-rata per kapita (Kertati, 2021). Sedangkan indeks pemberdayaan gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan keaktifan perempuan di bidang politik dan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2022). Partisipasi perempuan dalam ekonomi dapat diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan. Sedangkan kontribusi perempuan di bidang politik dapat dilihat dari keterlibatan

perempuan dalam parlemen serta pengambilan keputusan melalui perempuan sebagai tenaga profesional (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019).

Tingkat IPG Kalimantan Timur hanya 85,98 di bawah capaian nasional 91,07 dimana Kalimantan timur menempati posisi 31 dari 34 provinsi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur 2022). Rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan (Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2022). Rata-rata harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2022). Pengeluaran rata-rata laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan (Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2022). Tantangan untuk meningkatkan IPG di wilayah IKN baru adalah:

1. Meningkatkan angka harapan hidup laki-laki agar sama dengan perempuan
2. Meningkatkan rata-rata lama sekolah perempuan agar sesuai dengan rata-rata harapan lama sekolah perempuan yang tinggi
3. Meningkatkan pengeluaran rata-rata perempuan

Tingkat IDG di Kalimantan Timur masih mencapai angka 65,65 berada di bawah capaian nasional 75,24, menempati peringkat kedua terbawah dari 34 provinsi di Indonesia. Tingkat IDG di kabupaten Penajam Paser Utara 50,36 dan kabupaten Kutai Kartanegara 63,74 (Anon, 2021). Data menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan perempuan dalam parlemen masih rendah, perempuan sebagai tenaga profesional mengalami penurunan, Sumbangan pendapatan perempuan juga mengalami penurunan (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2022). Tantangan untuk meningkatkan IDG di wilayah IKN baru adalah dengan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam parlemen, mendorong perempuan untuk menjadi tenaga profesional dan meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan. Kendala dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan secara umum adalah kondisi struktural dan kultural (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, 2020).

3.2. Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di IKN baru

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan pemberdayaan gender, pemerintah provinsi Kalimantan timur telah menerbitkan peraturan daerah provinsi Kalimantan timur nomor 2 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Peraturan ini kemudian diimplementasikan dalam beberapa indikator kinerja pengarusutamaan gender (Mulawarman and Rokhmansyah, 2018). Hasil PUG telah meningkatkan IDG dan IPG di Kalimantan Timur namun angka IDG dan IPG masih jauh dari rata-rata nasional sehingga diperlukan inovasi strategi dalam meningkatkan IPG dan IDG di Kalimantan Timur khususnya di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pencegahan kekerasan. Keempat bidang ini akan mengatasi masalah kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) (Wisnujati, 2020). Berdasar pada tantangan peningkatan IDG dan IPG yang dihadapi oleh Kalimantan timur, strategi yang paling prioritas dalam peningkatan IDG dan IPG adalah di bidang pendidikan. Pendidikan akan meningkatkan kualitas SDM perempuan sehingga perempuan bisa berdaya di bidang politik, ekonomi dan kesehatan.

4. KESIMPULAN

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan di kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (wilayah IKN baru) masih tergolong sangat rendah, di bawah rata-rata capaian provinsi Kalimantan timur dan nasional. Implementasi kebijakan PUG khususnya dalam bidang pendidikan diharapkan mampu untuk mendorong tingkat IPG dan IDG dalam pembangunan IKN baru.

REFERENSI

- Anon. 2021. *Ketimpangan Gender Masih Terjadi di Kaltim*. (Jurnal Sumatra.Com, January 2).
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur. 2020. *Peraturan Daerah PUG Kaltim Dan Implementasinya*. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Gender*.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Indeks Pembangunan Gender (IPG)*.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2020-2021*.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. 2022. *Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin (Tahun), 2020-2021*.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. 2022. *[Metode Baru] Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun), 2019-2021*.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. 2022. *Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Laki-Laki Menurut Kabupaten/Kota (Tahun), 2019-2021*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2022. *Keterlibatan Perempuan Di Parlemen (Persen), 2020-2021*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2022. *Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen), 2020-2021*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2022. *Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2019-2021*.
- Jemparu, G. P. 2020. *Analisis Sentimen Publik Terhadap Isu Pemindehan Ibukota Negara Indonesia Pada Media Twitter*. (Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika Universitas Atma Jaya). Diakses di <http://e-journal.uajy.ac.id/22262/>.
- Kertati, Indra. 2021. *Analisis Indeks Pembangunan Gender (Ipg) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta*. (Public Service and Governance Journal 2(1):1–11).
- Kurniadi, A. 2019. *Pemilihan Ibukota Negara Republik Indonesia Baru Berdasarkan Tingkat Kebencanaan*. (Urnal Manajemen Bencana (JMB) 5(2):1–12).
- Mulawarman, Gede Widyatmike, dan Alfian Rokhmansyah. 2018. *Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kalimantan Timur*. Yogyakarta; Garudawhaca.
- Nugroho, H. 2020. *Pemindahan Ibu Kota Baru Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Kalimantan Timur: Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dan Konsumsi Energi*. (Bappenas Working Papers 3(1):33–41).

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2019. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019*. Diakses di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/24/2527/pembangunan-manusia-berbasis-gender-tahun-2019>.
- Silalahi, S. A. F. 2019. *Dampak Ekonomi Dan Risiko Pindahan Ibu Kota Negara 19*. (Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik 9(16):19–24).
- Wisnujati, Susantinah Nugrahini. 2020. *Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Kabupaten Bojonegoro*. (Journal UWKS Vol. 20 No. 2(2020):67–81. Diakses di <https://journal.uwks.ac.id/index.php/sosioagribis/article/view/1224>).